

SELEKSI AKADEMIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: ANTARA RASIONALITAS KEBIJAKAN DAN TANTANGAN DEMOKRASI LOKAL

Tofan Hidayat

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Wiralodra,

Indramayu, Indonesia

E-mail: tofanhidayat@unwir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa serta implikasinya terhadap praktik demokrasi lokal. Kebijakan seleksi akademik diterapkan sebagai mekanisme tambahan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan desa ketika jumlah bakal calon melebihi ketentuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan berlandaskan pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, serta lingkungan sosial-politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di Kabupaten Indramayu, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural implementasi seleksi akademik telah berjalan sesuai regulasi, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif. Tantangan utama kebijakan terletak pada lemahnya komunikasi kebijakan, ketimpangan latar belakang pendidikan calon, serta penerapan seleksi akademik yang bersifat kondisional, yang memunculkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan penerimaan demokratis masyarakat desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan seleksi akademik sebagai dilema antara rasionalitas kebijakan dan demokrasi lokal, serta penegasan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa perlu diukur tidak hanya dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari tingkat penerimaan demokratis masyarakat.

Kata Kunci: *Seleksi Akademik; Pemilihan Kepala Desa; Implementasi Kebijakan; Demokrasi Lokal; Pemerintahan Desa*

ABSTRACT

This study examines the implementation of the academic selection policy in village head elections and its implications for local democratic practices. The academic selection policy is implemented as an additional mechanism to improve the quality of village leadership, particularly when the number of prospective candidates exceeds the stipulated limit. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design and is grounded in the policy implementation model

of Van Meter and Van Horn, which emphasizes key variables including policy communication, resources, implementers' disposition, bureaucratic structure, and the socio-political environment. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis in Indramayu Regency and were analyzed using an interactive data analysis model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that, procedurally, the implementation of academic selection has complied with existing regulations; however, substantively, it has not been fully effective. The main challenges of the policy lie in weak policy communication, disparities in candidates' educational backgrounds, and the conditional application of academic selection, which has generated perceptions of injustice and reduced democratic acceptance among village communities. The novelty of this study lies in positioning academic selection as a dilemma between policy rationality and local democracy, emphasizing that the success of policy implementation at the village level should be assessed not only through procedural compliance but also through the degree of democratic acceptance within society.

Keywords: *Academic Selection; Village Head Election; Policy Implementation; Local Democracy; Village Governance*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi lokal yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan desa. Proses pemilihan ini tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme politik elektoral, tetapi juga sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan figur pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan kolektif warga desa. Dalam konteks tersebut, kualitas kepemimpinan desa menjadi isu penting yang terus mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintahan daerah. (Hasima, 2024; Kaka et al., 2023; Pasaribu, 2023).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan desa, sejumlah pemerintah daerah

menerapkan kebijakan seleksi akademik sebagai mekanisme tambahan dalam proses pemilihan kepala desa (Lutfi, 2024). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon kepala desa memiliki kapasitas pengetahuan dan kemampuan dasar yang memadai dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, penerapan seleksi akademik juga memunculkan perdebatan, terutama ketika kebijakan tersebut dipandang berpotensi membatasi hak politik warga desa dan memengaruhi prinsip kesetaraan dalam demokrasi lokal.

Dalam praktiknya, kebijakan seleksi akademik tidak selalu diterapkan secara seragam di setiap desa, melainkan bergantung pada kondisi tertentu, seperti jumlah bakal calon yang melebihi ketentuan. Penerapan kebijakan yang bersifat kondisional ini

menimbulkan dinamika sosial dan politik yang berbeda di tingkat desa, khususnya terkait persepsi keadilan dan legitimasi proses pemilihan kepala desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan rasional kebijakan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan desa dan kebutuhan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi lokal, yang menjadi fokus utama penelitian ini. (Haesevoets et al., 2023; Krick, 2022).

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pemilihan kepala desa dari aspek partisipasi politik, konflik sosial, dan legitimasi kepemimpinan desa (Bare'e, 2025; Nadeak & Mesra, 2025). Kajian yang secara spesifik membahas seleksi akademik sebagai instrumen kebijakan publik dan implikasinya terhadap demokrasi lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa serta mengkaji tantangan kebijakan tersebut terhadap praktik demokrasi lokal.

KAJIAN PUSTAKA

Demokrasi lokal di tingkat desa merupakan ekspresi paling nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia (Antlöv, 2003; Daniel et al., 2023). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung untuk menjamin partisipasi masyarakat

dalam memilih pemimpin lokal yang akan menjalankan fungsi pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan Masyarakat (Aidil, 2024; Lase, 2024). Pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu memenuhi prinsip demokrasi seperti kebebasan memilih, keterbukaan, dan akuntabilitas (Broockman et al., 2021; Junus et al., 2023). Namun, studi empiris menunjukkan bahwa praktik demokrasi di desa sering terhambat dinamika politik lokal seperti patronase, oligarki, atau fragmentasi sosial (contoh: dinamika politik lokal dalam Pilkades mencerminkan hegemoni kekuasaan sosial yang kuat di tingkat desa) (Ananda et al., 2025; Firmansyah & Ahmad, 2025; Padilah et al., 2025).

Kebijakan tambahan seperti seleksi akademik diterapkan di beberapa daerah untuk menyaring calon kepala desa yang jumlahnya melebihi batas tertentu, dengan harapan meningkatkan kualitas pemimpin desa (misalnya melibatkan perguruan tinggi dalam seleksi untuk profesionalisme dan objektivitas). Penelitian Setiawan et al. (2022) menjelaskan bahwa proses seleksi tambahan ini diwajibkan untuk mencapai objektivitas dalam proses pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dan sering memuat keterlibatan akademisi dalam proses seleksi (Setiawan et al., 2022). Temuan ini menunjukkan bahwa proses seleksi bukan hanya administratif tetapi memiliki dimensi politik dan substantif yang mempengaruhi legitimasi

demokratis Pilkades. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan tambahan ini juga telah dianalisis, misalnya dalam konteks Bangkalan, di mana aturan seleksi tambahan dinilai berpotensi membatasi hak untuk dipilih dan diskriminatif jika tidak dirancang dengan prinsip kesetaraan.

Implementasi seleksi akademik berpotensi membatasi prinsip demokrasi lokal. Seleksi berbasis kriteria akademik dapat memberikan keuntungan bagi calon dengan latar belakang pendidikan formal tinggi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses bagi calon yang memiliki modal sosial kuat tetapi tidak terlalu kuat secara akademik. Potensi ketidakadilan ini dapat menimbulkan konflik atau persepsi masyarakat bahwa proses Pilkades tidak inklusif. Temuan lain di konteks desa menunjukkan adanya dampak sosial-politik lain seperti patron-klien, jaringan sosial, dan faktor identitas dalam Pilkades yang dapat menguatkan atau melemahkan praktik demokrasi lokal, tergantung pada struktur sosial dan budaya di wilayah tersebut.

Dalam kajian kebijakan publik, menerapkan seleksi akademik dalam Pilkades dapat dipandang sebagai bentuk implementasi kebijakan publik di level lokal. Teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi ditentukan oleh berbagai faktor seperti komunikasi kebijakan, sumber daya, dan lingkungan sosial-

politik (*Van Meter & Van Horn, 1975*). Temuan empiris menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang kurang optimal dapat mereduksi legitimasi kebijakan sehingga masyarakat mempertanyakan proses demokrasi lokal itu sendiri.

Walaupun terdapat literatur tentang pemilihan kepala desa secara umum dan demokrasi desa, kajian yang secara khusus menggabungkan analisis implementasi seleksi akademik dengan pendekatan kebijakan publik dan implikasinya terhadap nilai demokrasi lokal masih relatif terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti dinamika politik lokal, partisipasi masyarakat, atau regulasi Pilkades secara normatif tanpa mengaitkan secara langsung kebijakan seleksi dengan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.

Dalam kerangka implementasi kebijakan publik, penelitian ini menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas implementasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) disposisi atau sikap pelaksana, serta (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik lingkungan kebijakan (*Ridho et al., 2025*).

Dalam konteks seleksi akademik pemilihan kepala desa, variabel komunikasi kebijakan dan lingkungan

sosial-politik menjadi faktor krusial karena berkaitan langsung dengan penerimaan masyarakat desa terhadap kebijakan.

Ketidakseimbangan komunikasi dan sensitivitas konteks sosial berpotensi menyebabkan kebijakan yang secara administratif rasional menjadi problematis secara demokratis (Putradi et al., 2025; Simbolon & Ivanna, 2024). Oleh karena itu, model implementasi kebijakan ini relevan untuk menganalisis dilema antara efektivitas kebijakan dan legitimasi demokrasi lokal.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi analisis deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa serta implikasinya terhadap praktik demokrasi lokal. (Medica et al., 2020; Saldana, n.d.) Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah proses kebijakan, interaksi antaraktor, serta konteks sosial-politik yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat desa (Sari et al., 2024). Lokasi penelitian berada di Kabupaten Indramayu, wilayah yang secara empiris menerapkan kebijakan seleksi akademik sebagai mekanisme tambahan dalam proses pemilihan kepala desa. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu mekanisme implementasi kebijakan seleksi akademik dan dinamika tantangan

kebijakan tersebut terhadap prinsip demokrasi lokal dalam konteks pemerintahan desa.

Informan penelitian berjumlah 12 orang yang ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap kebijakan yang diteliti. Informan tersebut mencakup aparatur pemerintah daerah yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, panitia seleksi akademik tingkat kabupaten, panitia pemilihan kepala desa di tingkat desa, serta tokoh masyarakat yang memahami proses seleksi dan dinamika pemilihan kepala desa. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan relevansi dan kedalaman data yang diperoleh.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara bersifat semi-terstruktur dengan tujuan menggali pandangan informan terkait tujuan kebijakan, mekanisme seleksi akademik, kendala implementasi, serta dampaknya terhadap legitimasi demokrasi lokal. Observasi dilakukan untuk menangkap dinamika empiris pelaksanaan seleksi akademik dan proses pemilihan kepala desa, sedangkan dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi akademik. (Sumilih et al., 2025).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis data

interaktif yang meliputi tahap pengorganisasian data, penajaman fokus melalui reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan secara bertahap. Proses analisis dilakukan secara manual tanpa bantuan perangkat lunak analisis kualitatif, dengan teknik pengkodean tematik yang disusun berdasarkan variabel implementasi kebijakan. Validasi temuan dilakukan melalui perbandingan silang antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta proses verifikasi berkelanjutan selama tahap analisis. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu kabupaten, sehingga temuan penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, hasil penelitian sangat bergantung pada kedalaman data dan interpretasi peneliti terhadap konteks sosial-politik setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Seleksi Akademik dalam Pemilihan Kepala Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu dilaksanakan sebagai mekanisme tambahan ketika jumlah bakal calon kepala desa melebihi batas yang ditetapkan. Secara normatif,

kebijakan ini dirancang untuk menjamin kualitas calon kepala desa melalui penyaringan berbasis kemampuan akademik dan pengetahuan umum terkait pemerintahan desa (Kulonprogo, 2022; Rasji & Gunardi, 2022). Pelaksanaan seleksi melibatkan perguruan tinggi sebagai pihak independen, yang dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dan profesionalitas proses seleksi.

Dari sisi prosedural, implementasi kebijakan seleksi akademik telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi daerah. Tahapan seleksi, pembentukan tim, hingga pelaksanaan ujian akademik dilakukan secara administratif dan terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa secara formal kebijakan tidak mengalami hambatan berarti. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, melainkan juga dari dampaknya terhadap nilai-nilai demokrasi lokal.

2. Dimensi Implementasi Kebijakan dan Temuan Empiris

Analisis implementasi kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan menjadi aspek paling krusial dalam menentukan penerimaan publik. Sosialisasi seleksi akademik kepada masyarakat desa belum dilakukan secara merata dan komprehensif. Akibatnya, sebagian masyarakat memahami seleksi akademik hanya sebagai ujian administratif tanpa

penjelasan yang memadai mengenai tujuan substantif kebijakan tersebut. Kondisi ini memicu munculnya resistensi, kecurigaan, dan penolakan terselubung terhadap kebijakan.

Dari sisi sumber daya, keterlibatan perguruan tinggi sebagai pelaksana seleksi merupakan kekuatan utama kebijakan ini. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten secara akademik mampu menjamin objektivitas dan transparansi proses seleksi (Pamungkas et al., 2024). Namun, kapasitas panitia di tingkat desa yang tidak merata menyebabkan perbedaan kualitas implementasi antar wilayah (Muryali et al., 2025). Hal ini memperkuat temuan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kesiapan aktor pelaksana.

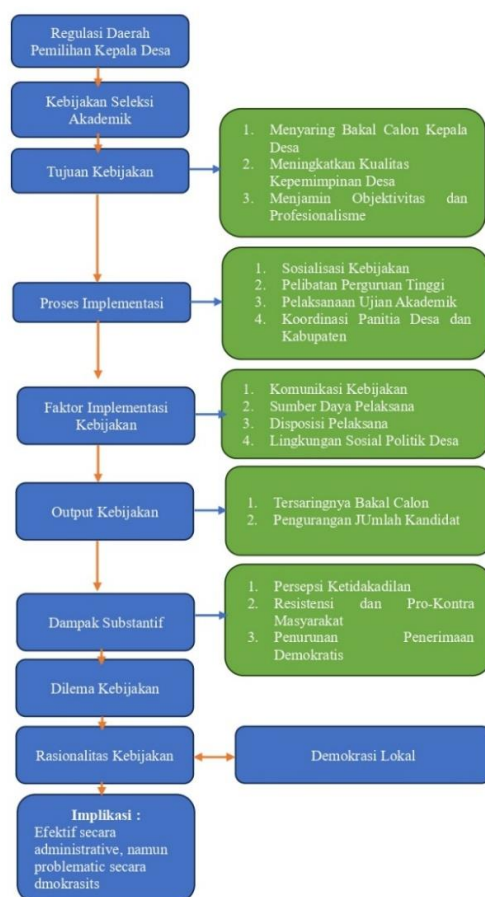
Disposisi pelaksana kebijakan pada umumnya menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan sesuai aturan. Akan tetapi, komitmen tersebut lebih bersifat administratif dibandingkan substantif. Pelaksana kebijakan cenderung fokus pada pemenuhan tahapan teknis seleksi, tanpa disertai upaya membangun pemahaman dan penerimaan sosial di tingkat masyarakat desa, seperti dijelaskan dalam tabel, sebagai berikut:

Dimensi Implementasi	Temuan Utama Penelitian
Komunikasi kebijakan	Sosialisasi kebijakan belum merata; masyarakat desa belum sepenuhnya memahami tujuan dan mekanisme seleksi akademik
Sumber daya	Ketersediaan SDM relatif memadai, terutama dengan keterlibatan perguruan tinggi; namun kapasitas panitia di tingkat desa masih bervariasi
Disposisi pelaksana	Aparatur pelaksana menunjukkan komitmen menjalankan kebijakan, tetapi bersifat administratif dan procedural
Struktur birokrasi	Struktur pelaksana jelas, namun koordinasi lintas aktor belum optimal
Lingkungan sosial-politik	Muncul resistensi dan persepsi ketidakadilan dari masyarakat akibat perbedaan latar belakang pendidikan calon

Untuk memperjelas keterkaitan antara tujuan kebijakan, proses implementasi seleksi akademik, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi lokal, penelitian ini menyajikan visualisasi alur implementasi kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa. Visualisasi ini dimaksudkan sebagai sintesis analitis yang menggambarkan bagaimana kebijakan yang dirancang secara rasional dan teknokratis dapat menghasilkan konsekuensi substantif yang kompleks ketika diimplementasikan dalam konteks sosial-politik desa. Gambar berikut menunjukkan bahwa implementasi seleksi akademik tidak hanya menghasilkan output administratif, tetapi juga memunculkan implikasi terhadap penerimaan demokratis dan legitimasi kepemimpinan desa seperti dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar.1 Alur Implementasi Seleksi Akademik dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal

Tabel.1 Temuan Implementasi Kebijakan Seleksi Akademik



Gambar 1 menunjukkan bahwa kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa berangkat dari regulasi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan desa melalui mekanisme penyaringan calon. Pada tahap tujuan kebijakan, seleksi akademik dirancang sebagai instrumen rasional untuk menjamin objektivitas, profesionalisme, dan kompetensi calon kepala desa.

Namun, pada tahap implementasi, penelitian ini menemukan bahwa proses pelaksanaan kebijakan menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek komunikasi kebijakan dan kesiapan aktor pelaksana. Sosialisasi kebijakan

yang terbatas menyebabkan pemahaman masyarakat desa terhadap tujuan seleksi akademik tidak terbentuk secara utuh. Di sisi lain, keterlibatan perguruan tinggi sebagai pelaksana seleksi mampu memperkuat aspek objektivitas, tetapi belum sepenuhnya menjawab persoalan penerimaan sosial.

Faktor-faktor implementasi kebijakan—sebagaimana dikemukakan dalam teori implementasi kebijakan—berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial-politik desa. Interaksi ini menghasilkan output kebijakan berupa tersaringnya bakal calon kepala desa, namun sekaligus memunculkan dampak substantif berupa persepsi ketidakadilan, resistensi masyarakat, dan penurunan penerimaan demokratis.

Flowchart ini menegaskan kebaruan penelitian bahwa seleksi akademik menciptakan dilema kebijakan, yakni efektivitas administratif yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi lokal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pemilihan kepala desa tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan prosedural, tetapi harus mempertimbangkan legitimasi dan penerimaan demokratis masyarakat desa.

3. Seleksi Akademik dan Tantangan Demokrasi Lokal

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah munculnya dilema antara rasionalitas kebijakan dan nilai demokrasi lokal. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa

tantangan demokrasi lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga muncul dari pola implementasi kebijakan seleksi akademik di tingkat desa.

Temuan mengenai penerapan seleksi akademik yang bersifat kondisional menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak diterapkan secara seragam di seluruh desa, melainkan hanya pada desa dengan jumlah bakal calon tertentu. Sebagai contoh, pada desa dengan jumlah bakal calon lebih dari lima orang, seleksi akademik diterapkan secara ketat, sementara pada desa dengan jumlah calon di bawah batas tersebut seleksi akademik tidak diberlakukan. Pola implementasi ini memunculkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, karena calon dengan latar belakang sosial kuat di desa tertentu harus mengikuti seleksi akademik, sedangkan di desa lain tidak.

Temuan ini sejalan dengan kajian implementasi kebijakan yang menekankan bahwa ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dapat melemahkan legitimasi kebijakan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi lokal (Dewi et al., 2023; Indarti & Riono, 2023; Ummah et al., 2023).

Seleksi akademik dipersepsikan oleh sebagian masyarakat sebagai mekanisme yang membatasi hak politik warga desa untuk dipilih (Hamzah et al., 2025). Persepsi ini terutama muncul pada calon kepala desa yang memiliki pengalaman sosial dan legitimasi lokal

yang kuat, namun kurang unggul secara akademik.

Penelitian ini mengungkap bahwa seleksi akademik diterapkan secara kondisional, yakni hanya pada desa dengan jumlah bakal calon tertentu. Pola implementasi yang tidak seragam ini melahirkan persepsi ketidakadilan, karena kebijakan yang sama menghasilkan perlakuan berbeda antar desa. Dalam konteks demokrasi lokal, ketidakseragaman tersebut tidak hanya berdampak pada proses seleksi, tetapi juga memengaruhi legitimasi hasil pemilihan kepala desa.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa seleksi akademik bukan sekadar instrumen administratif, melainkan kebijakan yang memiliki implikasi langsung terhadap prinsip kesetaraan, partisipasi, dan legitimasi demokrasi desa. Inilah titik kritis yang sering luput dari kajian-kajian sebelumnya (Ramadhani & Purnamawati, 2025).

Jika dianalisis menggunakan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi kebijakan dan lingkungan sosial-politik menjadi penentu utama keberhasilan implementasi seleksi akademik (Febriana et al., 2025; Masnun & Sepiyah, 2024). Meskipun sumber daya dan struktur birokrasi relatif memadai, lemahnya komunikasi kebijakan menyebabkan rendahnya penerimaan sosial (Fauziyah & Arif, 2021).

Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada penekanan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa perlu diukur tidak hanya dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari tingkat penerimaan demokratis masyarakat. Implementasi kebijakan yang secara administratif berhasil, namun ditolak secara sosial, berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal.

Temuan ini memperluas perspektif teori implementasi kebijakan dengan memasukkan dimensi demokrasi lokal sebagai indikator penting keberhasilan kebijakan publik di level pemerintahan desa. Dengan kata lain, kebijakan yang rasional secara teknokratis belum tentu legitim secara demokratis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu telah berjalan sesuai regulasi, namun belum sepenuhnya selaras dengan nilai demokrasi lokal. Tantangan utama kebijakan terletak pada komunikasi, penerimaan sosial, dan desain implementasi yang belum inklusif.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penempatan seleksi akademik sebagai arena dilematik antara rasionalitas kebijakan dan demokrasi lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan desa melalui seleksi akademik harus diimbangi dengan strategi implementasi yang sensitif terhadap konteks sosial dan nilai demokrasi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan seleksi akademik dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa secara administratif. Secara prosedural, kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk keterlibatan pihak independen dalam proses seleksi untuk menjaga objektivitas pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi seleksi akademik belum sepenuhnya mampu memperkuat praktik demokrasi lokal.

Lemahnya komunikasi kebijakan, perbedaan latar belakang pendidikan calon, serta penerapan seleksi yang bersifat kondisional memunculkan persepsi ketidakadilan di tingkat desa dan berdampak pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik di tingkat desa perlu dinilai tidak hanya dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari legitimasi dan penerimaan demokratis masyarakat.

Namun demikian, secara substantif kebijakan seleksi akademik belum sepenuhnya efektif dalam mendukung praktik demokrasi lokal. Tantangan utama implementasi kebijakan terletak pada lemahnya

komunikasi kebijakan kepada masyarakat desa, ketimpangan latar belakang pendidikan calon, serta penerapan seleksi akademik yang bersifat kondisional. Kondisi tersebut memunculkan persepsi ketidakadilan dan berdampak pada menurunnya penerimaan serta legitimasi demokratis terhadap proses pemilihan kepala desa.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat desa tidak dapat diukur semata-mata dari kepatuhan prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat penerimaan demokratis masyarakat. Seleksi akademik, oleh karena itu, perlu dipahami sebagai kebijakan yang berada dalam dilema antara rasionalitas administratif dan nilai-nilai demokrasi lokal.

1. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan seleksi akademik kepada masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga pada penjelasan tujuan substantif kebijakan agar masyarakat memahami seleksi akademik sebagai upaya peningkatan kualitas kepemimpinan desa, bukan sebagai pembatasan hak politik warga.

Kedua, desain seleksi akademik perlu disempurnakan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Penilaian terhadap calon kepala desa sebaiknya tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan lokal, keterlibatan sosial, dan legitimasi komunitas. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas kebijakan dan nilai demokrasi lokal.

Ketiga, penerapan seleksi akademik yang bersifat kondisional perlu dievaluasi secara kritis. Pemerintah daerah perlu memastikan keseragaman prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kebijakan antar desa agar tidak menimbulkan persepsi perlakuan yang berbeda terhadap calon kepala desa di wilayah yang berbeda.

Keempat, evaluasi implementasi kebijakan publik di tingkat desa disarankan untuk memasukkan dimensi penerimaan demokratis sebagai indikator keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan demokratis.

2. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan seleksi akademik terhadap kinerja kepala desa dan kualitas tata kelola pemerintahan

desa setelah terpilih. Kajian longitudinal akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas seleksi akademik dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan desa.

Selain itu, penelitian komparatif antar daerah dengan model seleksi calon kepala desa yang berbeda dapat dilakukan untuk memperluas generalisasi temuan dan mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam menyeimbangkan rasionalitas kebijakan dan demokrasi lokal. Pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) juga dapat digunakan untuk melengkapi temuan kualitatif, khususnya dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan kebijakan seleksi akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, D. S. R. (2024). PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: Menilai Dampaknya terhadap Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1126–1137.
- Ananda, H., Azahra, A. S., Sari, S., Palestina, D. R., Halim, A., Hidayatulloh, R., & Priambodo, L. P. (2025). Pengaruh Oligarki dan Politik Uang pada Hambatan Struktural Demokrasi di Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 1154–1160.
- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in indonesia: the new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Bare'e, Y. J. (2025). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA:(Analisis Keterlibatan dalam Voting, Kampanye, Diskusi Politik, serta Kendala Kultural dan Struktural Politik). *JURNAL POLAHI*, 3(1), 45–58.
- Broockman, D., Callander, S., Finan, F., Gaima, E., Gardete, P., Jha, S., Kanu, A., Lazear, E., Herbert, M., & Olken, B. (2021). *No Title*.
- Daniel, A., Lauth, H. J., & Rothfuß, E. (2023). *Local Self - Governance and Weak Statehood : A Convincing Liaison ?* 11(2), 272–279.
- Dewi, M. P., Arifah, K. N., & Aji, A. B. (2023). *Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*. 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.35960/inconcret.o.v2i1.991>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672–691.

- Febriana, R., Dahlan, S., & Noviana, N. (2025). Implications of Extension of the Term of Office of the Village Head Based on Law No. 3 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 Concerning Villages Towards the Principles of Democracy in Kerato Village. *International Journal of Law Crime and Justice*. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i3.760>
- Firmansyah, A., & Ahmad, R. (2025). Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum*, 1(1), 18–23.
- Haesevoets, T., Roets, A., Severen, R. Van, Dierckx, K., & Verschuere, B. (2023). The public 's preferred level of involvement in local policy - making. *Scientific Reports*, 1–17. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34282-w>
- Hamzah, B., Liliweri, A., & Pustaka, D. (2025). *Pemilu di Daerah Kepulauan, antara Mekanisme Administratif & Demokratik*. Detak Pustaka.
- Hasima, R. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Lakidende Law Review*, 3(2), 579–591.
- Indarti, N., & Riono, S. H. (2023). Optimalisasi Tata Kelola Desa: Evaluasi Mendalam terhadap Proses Seleksi Perangkat Desa. *Jurnal Bangun Abdimas*, 2(2), 158–161. <https://doi.org/10.56854/ba.v2i2.259>
- Junus, D., Nuna, M., Hunawa, R., Sahi, N. A., Tumuhulawa, A., Gorontalo, U., Gorontalo, U., & Gorontalo, U. (2023). *Good village governance di desa ayumolingo*. 11, 51–62.
- Kaka, I., Yohanes, S., & Tupen, R. R. (2023). PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN DEMOKRASI (STUDI TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA PRAIBAKUL DAN MBATAPUHU, KECAMATAN HAHARU, KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021). *Petitum Law Journal*, 1(1), 239–247.
- Krick, E. (2022). Participatory Governance Practices at the Democracy - Knowledge - Nexus. *Minerva*, 60(4), 467–487. <https://doi.org/10.1007/s11024-022-09470-z>
- Kulonprogo, D. I. (2022). *PENINGKATAN KAPASITAS CALON LURAH DALAM SELEKSI TAMBAHAN PADA PEMILIHAN LURAH SERENTAK 2021*. 6(2), 1559–1569.
- Lase, V. T. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Hiliganoita Kecamatan*

- Bawolato Kabupaten Nias Tahun 2022*. Universitas Medan Area.
- Lutfi, M. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Kepala Desa; Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Implementasi Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 43 Tahun 2022. *Jurnal Darma Agung*, 32(5), 117–126.
- Masnun, M., & Sepiyah, S. (2024). Kebijakan pemerintah dalam menerapkan kewenangan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang no.6 tahun 2014. *Deleted Journal*, 4(1), 105–125. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>
- Medica, P., Husada, F., Ustiawaty, J., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Muryali, M., Yani, A., Aiyub, A., Nazaruddin, N., & Maryam, M. (2025). Publicity as a Policy Instrument: Analyzing Communication Strategies and Public Perception of Aceh's Teacher Capacity Enhancement Policy. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(2), 683. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i2.683>
- Nadeak, D., & Mesra, R. (2025). Sistem Politik dan Demokrasi dalam Musyawarah Pemilihan Kepala Desa (Hukum Tua) di Desa Lompad, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, 2(4), 402–412.
- Padilah, A. H., Patriani, I., Ritaudin, R., Nazari, N. A., & Apriyani, E. (2025). Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Dinamika Masa Jabatan 8 Tahun. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 61–70.
- Pamungkas, P. B., Fachruddin, I., & Abror, M. D. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Interaksi*, 1(4), 412–422. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i4.6013>
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive*, 1(1).
- Putradi, D. F., Nabhani, I., Akbar, G. G., Ningsih, M. A., Ulumudin, A., & Shafie, N. A. (2025). Political Communication between DPRD and Village Government in Shaping the Main Policy Ideas for Village Development. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(VIII), 4471–4480. <https://doi.org/10.47772/ijriss.202>

- 5.908000357
- Ramadhani, M. M., & Purnamawati, N. (2025). Kepemimpinan Grassroot dan Kearifan Lokal dalam Implementasi Pilkades Serentak: Membangun Martabat Pemimpin Desa di Era Demokratisasi. *Riwayat*, 8(2), 1909–1918. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i2.46348>
- Rasji, R., & Gunardi, G. (2022). Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pemilihan kuwu di kabupaten indramayu tahun 2021. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 129. <https://doi.org/10.24912/jmishums.en.v6i1.13523.2022>
- Ridho, R., Adiputra, Y. S., & Darmawan, E. (2025). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024. *Presidensial*, 2(3), 121–132. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i3.1054>
- Saldana, M. B. M. A. M. H. J. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Arizona State University.
- Sari, M. N., Abdillah, L. A., Asmarany, A. I., Rakhmawati, I., Pattiasina, P. J., Kusnadi, I. H., Hasanuddin, R., Pradana, I. P. Y. B., & Rela, I. Z. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*. MEGA PRESS NUSANTARA. <https://books.google.co.id/books?id=gPVNEQAAQBAJ>
- Setiawan, A., Rohayatin, T., Kushartono, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 990–995.
- Simbolon, P. A., & Ivanna, J. (2024). Komunikasi Politik Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Masyarakat Raya Palka Sindangsari. *Journal on Education*, 6(4), 22327–22338. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6341>
- Sumilih, D. A., Jaya, A., Fitriyaningsih, A. D. R., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Irawan, E. P., Dirna, F. C., Rachmaningtyas, N. A., Ras, A., Pujiriyani, D. W., & Setyorini, N. (2025). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=0O9aEQAAQBAJ>
- Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. N. (2023). Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi. *Jurnal USM Law Review*. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3>

